

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Isu lingkungan telah menjadi salah satu fokus bagi kajian ilmu Hubungan Internasional sejak berakhirnya Perang Dingin (*cold war*). Isu lingkungan hidup yang krusial telah menjadi suatu persoalan dalam skala internasional.¹ Hal ini ditandai dengan diangkatnya isu lingkungan pada level internasional untuk pertama kalinya pada United Nations Conference di Stockholm pada tahun 1972 yang membahas mengenai isu perubahan iklim (*climate change*). Setelah melalui proses negosiasi dan kerjasama yang panjang maka terbentuklah berbagai kesepakatan yang pada dasarnya menggambarkan cerminan dari setiap kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara dalam menanggapi isu lingkungan hidup pada tingkat global.²

Pesatnya perkembangan globalisasi yang tidak mengenal batas-batas negara, baik itu di bidang ekonomi, komunikasi maupun teknologi turut mempengaruhi lingkungan hidup.³ Hal tersebut juga merubah *mindset* masyarakat global terhadap lingkungan. Pentingnya peran lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, menciptakan sebuah kesadaran bagi masyarakat dunia. Dengan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara membuat topik ini diangkat ke forum internasional. Kesadaran yang terbentuk pada masyarakat dunia mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup membuat dilakukannya diplomasi lingkungan

¹ Ganewati Wuryandari, "Politik Luar negeri Indonesia dan Lingkungan Hidup." Vol 8, No.1.2011, hal: 125

² Nurul Isnaini & Broto Wardoyo, "Isu Lingkungan Hidup Global: Tantangan Kebijakan Luar Negeri dan Negosiasi Multilateral," Global Vol.9 No.2(Desember 2007-Mei 2008) hal:

³ Pramudianto Andreas, "Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta,(Jakarta: UIP 2011), hal:3

hidup dengan melibatkan peran maupun masukan dari berbagai aktor internasional yang berasal dari aktor negara maupun non-negara.⁴

Banyaknya isu lingkungan yang terjadi, tidak hanya di negara maju tapi juga dialami oleh negara negara berkembang.⁵ Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, selain terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya, di samping itu juga memiliki berbagai permasalahan lingkungan yang beragam. Mulai dari isu perubahan iklim, pencemaran lingkungan, degradasi lahan atau deforestasi, punahnya flora dan fauna, sampai kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap yang melewati lintas batas negara (*Transboundary Haze*).

Kebakaran hutan yang menyebabkan *Transboundary Haze* selain disebabkan faktor alami, sebagian besarnya disebabkan oleh ulah tangan manusia yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Pembakaran hutan yang dilakukan serta pembukaan lahan sebagian besar di latar belakang oleh faktor ekonomi sehingga masyarakat maupun instansi non-pemerintah berlomba-lomba untuk mendapatkan lahan dengan cara pembakaran hutan. Metode pembakaran hutan ini dilakukan karena dianggap lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu dan dana. Selain itu faktor alam juga turut mendorong manusia melakukan pembakaran hutan, karena tanaman yang tumbuh di tanah berjenis gambut sulit untuk disingkirkan kecuali di bakar.⁶

Tahun 1997 adalah sejarah kebakaran hutan terburuk di dunia, khususnya di alami oleh negara berkembang yang berada di kawasan tropis dan sub-tropis. Berdasarkan laporan World Wide Fund and Nature (WWF); kebakaran hutan terjadi di negara Indonesia, Brazil dan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik, Amerika Latin, dan Afrika, dimana kebakaran terparah

⁴ Pramesthi Cahyani Hedhi Ningsih, "Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement," *Insignia Journal of International Relations* Vol. 6, No.2, hal:83

⁵ Pramudianto Andreas, "Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta,(Jakarta: UIP 2011), hal:3

⁶ Kabut Asap: Isu Ancaman Non-Tradisional dalam Kajian Keamanan Regional, (Malaysia:Arah Publications), hal: 523

terjadi di negara Indonesia.⁷ Hal ini dikarenakan total lahan yang hilang selama masa kebakaran pada saat itu adalah sekitar 9.75 juta ha. Terlebih lagi kebakaran hutan pada tahun 1997 juga dipengaruhi oleh fenomena El-nino yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebakaran tersebut menghasilkan emisi CO₂ sebesar 0.81-2.5 Giga Ton.⁸

Meskipun fokus terhadap isu kebakaran yang menyebabkan *Transboundary Haze* terus meningkat, sampai saat ini belum ada kemajuan terhadap cara mengatasi pembakaran hutan di Indonesia.⁹ Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan pemerintah yang dianggap ambigu secara ekonomi dan kelembagaan terkait isu lingkungan tersebut.¹⁰ Sehingga, hal ini tidak hanya merugikan negara Indonesia sebagai asal dari *Transboundary Haze*, namun negara yang berdekatan dengan wilayah asal kebakaran hutan di Indonesia.

Pada dasarnya lokasi titik api yang menjadi penyebab kabut asap yang terjadi secara geografis berdekatan negara Malaysia dan Singapura. Menurut laporan pencitraan satelit NOAA pada Oktober 2006; jumlah titik api mencapai 15.443 dan jumlah titik api harian pada tanggal 5 Oktober 2006 sebanyak 3.786, sehingga dalam kasus ini dua negara tersebut mengalami dampak langsung dari *Transboundary Haze*, sehingga dalam masalah isu lingkungan *Transboundary Haze* baik alami maupun buatan manusia tidak hanya merugikan negara Indonesia sebagai negara sumber bencana tetapi juga negara tetangga yang berdekatan dengan negara Indonesia

⁷ Indonesia Fire and Haze: The Cost of Catastrophe (Reprint 2006)

⁸ Afid Nurkholis, et al, ,Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1977 dan 2015 (studi Kasus: Provinsi Riau), Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal:6

⁹ Lucca Tacconi, "Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, biaya dan Implikasi Kebijakan." CIFOR Occasional Paper No. 38(i) hal: 32

¹⁰ Lucca Tacconi 54

seperti Malaysia dan Singapura yang ikut mengalami dampak buruk, mulai dari masalah kesehatan seperti penyakit ISPA dan masalah keberlangsungan perekonomiannya.¹¹

Singapura merupakan salah satu negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia yang terkena yang mengalami kerugian akibat dampak *Transboundary Haze* yang terjadi. Kerugian dialami sejak bencana kabut asap tahun 1997, kemudian berlanjut tahun 2006, dan tahun 2013. Dalam bidang ekonomi, pada tahun 2013 Singapura mengalami kerugian USD 58 juta kerugian akibat kabut asap yang dialami selama kurang lebih tiga bulan mencapai USD 286 juta. Selain itu, kabut asap lintas batas negara juga terjadi pada tahun 2006. Para pakar berpendapat, jika kabut asap tahun 2006 juga bertahan selama lebih dari tiga bulan seperti pada tahun 1997, maka kerugian ekonomi Singapura diperkirakan akan jauh lebih besar dibanding waktu itu. Sebab, nilai produksi industri pariwisata pada waktu itu jauh lebih tinggi dibanding tahun 1997. Dalam menanggapi isu kabut asap lintas batas tersebut berbagai nota protes berupa telah dilayangkan oleh Singapura yang telah berlangsung sejak tahun 1997 salah satunya adalah nota protes oleh kepala *National Environment Agency (NEA)*, Ronnie Tay, kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Indonesia saat itu.¹²

Dalam menangani isu *Transboundary Haze* ini telah banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah lingkungan tersebut, baik kebijakan domestik yang berupa pengarahan langsung dari presiden kepada pasukan militer dalam menjinakkan titik api, water bombing, maupun hujan buatan. Namun, usaha tersebut dinilai tidak lah cukup untuk mencegah *Transboundary Haze*. Indonesia telah melakukan diplomasi lingkungan sejak zaman

¹¹ Kabut Asap: Isu Ancaman Non-Tradisional dalam Kajian Keamanan Regional, (Malaysia: Arah Publications), hal: 525-525

¹² Kardina Gultom, "SEKURITISASI KABUT ASAP DI SINGAPURA TAHUN 1997-2014," *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, hal:34

kepemimpinan presiden Soekarno pada tahun 1945, ditandai dengan ikut berpartisipasinya delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan internasional terkait masalah lingkungan pada level global. Isu lingkungan seperti kabut asap lintas batas merupakan masalah yang kompleks dan berkelanjutan sampai saat ini.¹³ Diplomasi lingkungan menjadi konsep yang menarik untuk dihubungkan untuk isu *Transboundary Haze* yang terjadi di Indonesia sampai sekarang. Selain itu, masalah lingkungan hidup seperti kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran kabut asap lintas batas menjadi titik putar bagi Indonesia mereformulasikan konsep diplomasi lingkungan. Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menjadi sangat aktif di dalam berbagai forum negosiasi lingkungan multilateral seperti pada sidang UNFCCC ke 17/COP ke 13 pada tahun 2007 di Bali, Denpasar. Ditambah lagi berbagai kebijakan domestik dihasilkan untuk menahan laju deforestasi dan kerusakan lingkungan hidup.¹⁴

I.2 Rumusan Masalah

Banyaknya isu lingkungan yang terjadi saat ini menentukan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Salah satu isu lingkungan kompleks yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia sampai saat ini adalah isu kabut asap lintas batas atau *Transboundary Haze* yang disebabkan oleh kebakaran hutan baik itu alami dan oleh campur tangan manusia. Banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan yang menjadi penyebab *Transboundary Haze* dinilai masih belum cukup. Indonesia yang telah melakukan diplomasi lingkungan sejak zaman kepemimpinan Soekarno, yang ditandai dengan berpartisipasinya delegasi negara Indonesia dalam berbagai konvensi Internasional. Dalam menghadapi isu lingkungan *Transboundary Haze*, strategi atau upaya diplomasi lingkungan apa saja yang

¹³ Pramudianto Andreas, "Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta," (Jakarta: UIP 2011), Hal.300

¹⁴ Obsatar Sinaga, Yanyan Mochamad yani, Ferdinand Robertua Siahaan, "Diplomasi Lingkungan Indonesia: Antara Asa dan Realita." Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2018) hal: 2

dilakukan pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soudjato Bambang Yudhoyono dalam mengatasi isu *Transboundary Haze* terutama terhadap negara terdampak yang secara geografis berdekatan dengan sebagian titik api kebakaran hutan yang ada di Indonesia.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut; Strategi- strategi diplomasi lingkungan seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia terkait isu lingkungan *Transboundary Haze* pada era kepemimpinan Presiden SBY?

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi-strategi atau bentuk diplomasi lingkungan Indonesia terkait isu *Transboundary Haze* pada era kepemimpinan Presiden SBY.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah pertimbangan dan menambah pengetahuan serta pemahaman dalam ilmu Hubungan Internasional, khususnya terkait isu *Transboundary Haze* dan diplomasi lingkungan di Indonesia.
2. Secara Praksis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan terkait kajian yang diteliti.
3. Menjadi salah satu referensi bagi penelitian-penelitian yang berhubungan dengan diplomasi lingkungan pada masa mendatang.



I.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menampilkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan maksud untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai penelitian yang akan diteliti saat ini.

Tulisan yang pertama berasal dari Pramesti Cahyani Hedhi Ningshah yang berjudul, “Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui *REDD+ Agreement*.”¹⁵ Di dalam tulisan tersebut membahas mengenai isu lingkungan seperti deforestasi atau degradasi lahan yang membutuhkan kesadaran dan kerja sama oleh berbagai instansi serta alat atau sarana untuk mendukung penerapan ketentuan-ketentuan demi menahan laju emisi yang dihasilkan oleh aktivitas- aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan sebagai negara yang terkenal dengan kekayaan lingkungannya. Demi menahan laju emisi akibat degradasi lingkungan yang disebabkan oleh campur tangan manusia tersebut melakukan kebijakan diplomatik dengan negara Norwegia dalam bidang lingkungan melalui sebuah lembaga yang bernama REDD+, yang bertujuan untuk menahan laju emisi gas yang dihasilkan oleh degradasi lahan atau deforestasi yang terjadi di Indonesia.

Tulisan yang kedua berasal dari Obsatar Sinaga, Yanyan Mochamad Yani, dan Ferdinand Robertua Siahaan yang berjudul; “Diplomasi Lingkungan Indonesia Antara Asa dan Realita.”¹⁶ Di dalam jurnalnya membahas mengenai isu lingkungan kompleks yang sampai saat ini masih terus terjadi, yaitu isu kebakaran hutan yang menghasilkan kabut asap lintas batas

¹⁵ Pramesti Cahyani Hedhi Ningshah, “Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui *REDD+ Agreement*.” *Insignia Journal of International Relations* Vol. 6, No.2, November 2019

¹⁶ Obsatar Sinaga, Yanyan Mochamad yani, Ferdinand Robertua Siahaan: “Diplomasi Lingkungan Indonesia: Antara Asa dan Realita.” Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2018)

negara yang mempengaruhi keamanan (*security*) dan stabilitas ekonomi negara, baik Indonesia sebagai negara sumber isu lingkungan maupun negara yang terdampak oleh *Transboundary Haze*, khususnya negara Singapura dan Malaysia yang secara geografis sangat berdekatan dengan sebagian besar lokasi sumber kebakaran hutan yang menghasilkan *Transboundary Haze* tersebut. Sehingga isu lingkungan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan negara Indonesia yang saat ini berkuasa untuk kedepannya. Selain itu, di dalam tulisan ini menganggap bahwa politik internasional yang semakin kompleks dan cenderung berubah, ditambah lagi dengan munculnya aktor-aktor baru non-negara serta dinamika politik nasional telah menjadikan diplomasi lingkungan di Indonesia menjadi sulit untuk di arahkan. Pembuat kebijakan harusnya memutuskan berbagai isu–isu yang bersifat dilematis menggunakan kerangka hukum yang berlaku dan keinginan masyarakat luas.



Tulisan yang ketiga berasal dari Tulisan pertama berasal dari Ganewati Wuryandari yang berjudul; “Politik Luar Negeri Indonesia dan Lingkungan.”¹⁷ Di dalam tulisannya membahas mengenai pemanasan global dan perubahan iklim yang menjadi fokus utama karena dampaknya sangat besar terhadap lingkungan hidup mulai dari melelehnya es di Samudera Pasifik yang menyebabkan tenggelamnya pulau–pulau kecil, kekeringan, timbulnya berbagai macam virus dan penyakit baru, degradasi lingkungan, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, isu pemanasan global ini dianggap sebagai masalah yang serius, sehingga setiap negara termasuk negara Indonesia harus mengelola lingkungan masing –masing. Selain itu, di dalam tulisan ini kebijakan nasional dalam negeri saja tidaklah cukup. Setiap negara dituntut untuk melakukan kebijakan luar negeri seperti diplomasi lingkungan. Di antaranya ikut meratifikasi isu perubahan iklim dalam Konvensi PBB, menjadi tuan rumah dalam pertemuan

¹⁷ Ganewati Wuryandari, “Politik Luar Negeri Indonesia dan Lingkungan Hidup.” Vol. 8 No. 1, 2011

internasional yang membahas mengenai isu lingkungan hidup, berpartisipasi dalam mengirimkan perwakilan delegasinya dalam pertemuan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Namun, yang menjadi problem saat ini adalah negara Indonesia masih belum sadar dan kritis dalam merespon isu tersebut. Dibutuhkan koordinasi setiap kepentingan dari berbagai lembaga untuk mengatasi isu-isu lingkungan tersebut.

Tulisan keempat berasal dari Asdar yang berjudul “*Transboundary Haze Pollution Di Malaysia dan Singapura Akibat Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau: Ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional*,”¹⁸ yang ditulis oleh Asdar. Di dalam jurnalnya penulis menjelaskan tentang kasus kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap parah yang melewati lintas batas negara (*Haze Transboundary*), sehingga tidak hanya merugikan negara asal tempat kejadian tetapi juga negara tetangga yang secara geografis berdekatan dengan lokasi Titik api kebakaran hutan tersebut. Dalam tulisan ini dijelaskan juga bahwa kabut asap tersebut disebabkan oleh kelalaian negara Indonesia dalam mengelola hutan dan merupakan kegagalan dalam menerapkan standar langkah – langkah pengelolaan hutan. Dan pencegahan kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap yang melewati batas yurisdiksi negara Indonesia. Hal ini sangat mempengaruhi dan mengganggu lingkungan di negara lain, dan sangat bertentangan dengan prinsip hukum internasional, khususnya yang mengatur tentang hukum lingkungan.

Tulisan yang kelima berasal dari Tim Forsyth tentang “*Public concerns about Transboundary Haze: A Comparison of Indonesia, Singapore, and Malaysia*.”¹⁹ Membahas mengenai perhatian terhadap masalah lingkungan menciptakan sebuah narasi yang

¹⁸ Asdar, “Transboundary Haze Pollution Di Malaysia dan Singapura Akibat Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau: Ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional,” D 101 09 519,

¹⁹ Tim Forsyth tentang “Public concerns about transboundary haze: A Comparison of Indonesia, Singapore, and Malaysia.” *Global Environment Change*.”

mempengaruhi kebijakan oleh pengalokasian peran keterlibatan, bertanggung jawab pada suatu pihak. Selain itu juga dijelaskan mengenai isu kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan di Indonesia yang menyebabkan tidak hanya negara Indonesia tetapi juga negara Malaysia dan Singapura yang ikut mengalami krisis baik itu kesehatan maupun perekonomian sejak tahun 1997. Terpisah dari itu selain faktor alam seperti El nino diartikel ini juga dijelaskan keterlibatan perusahaan - perusahaan Singapura dan Malaysia yang ikut bertanggung jawab terhadap kebakaran tersebut.

Hal yang membedakan tulisan penulis dengan kajian – kajian pustaka di atas adalah meski sama- sama membahas mengenai isu lingkungan, reaksi pemerintah dalam menanggapi isu lingkungan, serta diplomasi lingkungan. Penulis dalam penelitian ini lebih mengkaji kepada strategi-strategi *environmental diplomacy* pemerintah Indonesia dalam menangani isu lingkungan *Transboundary Haze*, terutama pada zaman kepemimpinan presiden SBY.



I.7 Kerangka Konseptual

I.7.1 Diplomasi Lingkungan

Pengertian Diplomasi menurut KM Panikar adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain melalui negosiasi dengan cara damai, apabila cara-cara damai tidak berhasil untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, maka diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Menurut K. Panikkar diplomasi dalam *The Principle and Practice of Diplomacy*, merupakan suatu seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dengan demikian pelaksanaan diplomasi akan mengarah kepada kepentingan nasionalnya. Tujuan dari dilakukannya diplomasi adalah untuk pengamanan kepentingan negara

atau untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri, selain itu terdapat tujuan - tujuan vital yaitu: ekonomi, politik, budaya dan ideologi. Dengan demikian diplomasi lingkungan dimaksudkan sebagai upaya mengamankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam rangka mewujudkan kepentingan yang berhubungan dengan masalah ekologi.

Menurut William Coplin, kebijakan sebuah negara pada dasarnya akan dipandu oleh beberapa pertimbangan. Pertimbangan ini menyangkut: Pertimbangan dalam negeri meliputi nilai, social budaya dan opini publik, pertimbangan ekonomi dan pertahanan serta perubahan yang terjadi di dalam konteks internasional.²⁰ Sementara itu bentuk-bentuk dalam diplomasi dapat bermacam-macam seperti diplomasi publik, diplomasi HAM, diplomasi ofensif, diplomasi kebudayaan, diplomasi lingkungan dan lain sebagainya. Adapun bentuk diplomasi lingkungan (*environment diplomacy*) adalah diplomasi yang muncul karena persoalan lingkungan hidup yang diangkat menjadi persoalan politik global.²¹ Sementara itu pengertian diplomasi lingkungan (*enviromental diplomacy*) menurut Borg adalah keahlian dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup yang memiliki dampak dalam lingkup internasional. Selain itu terdapat beberapa prinsip dasar dalam melakukan diplomasi lingkungan sebagai berikut:²²

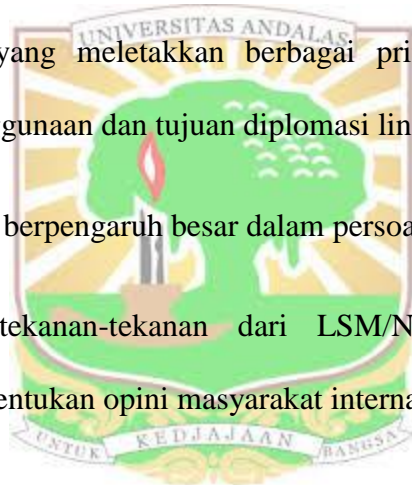
- a. Perjanjian atau konvensi internasional sebagai petunjuk dalam praktek negara-negara.
- b. Status dari prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.

²⁰ Pramudianto Andreas, hal 26

²¹ M. Scoullou dan A. Roniotes, *The Evolution of Environmental Policies in the Mediterranean from an NGO perspective*, Athens 2003, hal 13.

²² Pramudianto Andreas, hal 35

- c. Tindakan preventif lebih dapat dimengerti dalam mencapai konsensus di antara negara-negara
- d. Kebutuhan akan informasi dan konsultasi di antara negara-negara
- e. Hukum kebiasaan internasional yang mengalami proses sejarah yang panjang.
- f. Keputusan pengadilan internasional yang dapat melibatkan agen diplomatik.
- g. Berbagai resolusi badan PBB serta deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan internasional yang akan mempengaruhi politik luar negeri.
- h. Keputusan UNEP yang meletakkan berbagai prinsip dan petunjuk yang dapat mempengaruhi penggunaan dan tujuan diplomasi lingkungan.
- i. Laporan-laporan yang berpengaruh besar dalam persoalan lingkungan.
- j. Pendapat umum, tekanan-tekanan dari LSM/NGO Internasional yang akan mempengaruhi pembentukan opini masyarakat internasional.

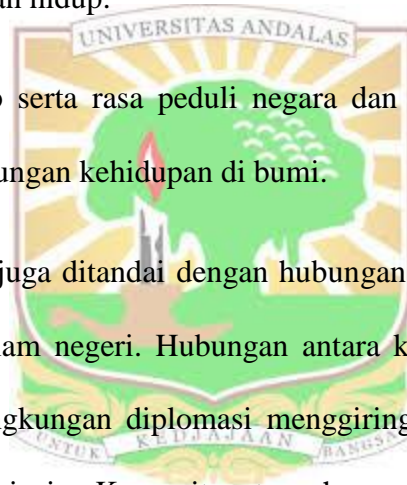


Berbagai perundingan untuk membentuk suatu regulasi baru dinilai penting sekali. Hal ini juga membuktikan bahwa bagaimana keseimbangan dunia ditentukan oleh kondisi lingkungan yang baik. Perundingan di bidang lingkungan hidup akan semakin kompleks dan melebar secara tak terkendali. Pentingnya diplomasi lingkungan adalah:²³

- a) Perundingan lingkungan hidup di kemudian hari akan terus berlanjut.
- b) Perundingan tersebut tidak akan selesai selama permasalahan lingkungan belum terselesaikan.

²³ Pramudianto Andreas, hal 300

- c) Meningkatnya kerusakan lingkungan global, telah menuntut aktor seperti negara dalam menangani masalah tersebut.
- d) Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan sangat besar dampaknya bagi lingkungan hidup.
- e) Kekurangan SDA peningkatan populasi akan menimbulkan konflik di kemudian hari.
- f) Sistem, perangkat kelembagaan, serta norma-norma akan terus berkembang di bidang lingkungan hidup.
- g) Tanggung jawab serta rasa peduli negara dan manusia akan sangat meningkat demi keberlangsungan kehidupan di bumi.



Diplomasi Lingkungan juga ditandai dengan hubungan yang kompleks antara kebijakan dan politik luar negeri dan dalam negeri. Hubungan antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang melekat dalam lingkungan diplomasi menggiring aktor baru masuk dalam ranah diplomasi seperti komunitas bisnis. Komunitas tengah memiliki andil dalam pengambilan keputusan dengan telah menjadi aktif dalam perundingan mengenai isu lingkungan hidup internasional. Kepemilikan tanah, properti, usaha serta peranan dalam dinamika perekonomian juga secara tidak langsung membawa aktor bisnis harus turut campur dalam permasalahan lingkungan. Tujuan pokok yang ingin dicapai dalam diplomasi lingkungan diantaranya adalah berupaya untuk mencoba menerapkan hukum lingkungan internasional dan melanjutkannya dengan apa yang telah disepakati. Hukum lingkungan internasional ini telah memberikan hak dan kewajiban yang menjaga sistem keseimbangan diantara negara, non-negara dan masyarakat

internasional lainnya. Karena itu diplomasi lingkungan akan berperan penting dalam sistem politik internasional.²⁴

Diplomasi lingkungan merupakan bagian dari *soft diplomacy* yang mempunyai peran penting dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta perkembangan hubungan internasional saat ini. Masalah lingkungan dalam skala global menuntut kesepakatan Internasional yang melibatkan aksi bersama. Konsep lingkungan global menimbulkan tanggung jawab yang besar pada tingkat nasional dan internasional. Akan tetapi kerjasama internasional seringkali mengalami benturan dalam menangani isu lingkungan dikarenakan adanya kepentingan – kepentingan yang berbeda diantara pihak – pihak yang terlibat. Diplomasi lingkungan berperan penting dalam hal ini dan menjadi suatu instrument yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup global, karena membantu menghubungkan banyak kesepakatan maupun proses negosiasi lanjutan yang akan dilakukan. Pada hakekatnya diplomasi adalah “tatacara berhubungan secara damai antara satu negara dengan negara lainnya , serta kemampuan dalam mengelola hubungan antarnegara, taktik, kemampuan atau kepiawaian dalam berinteraksi dengan orang lain.” Dalam diplomasi lingkungan, masalah lingkungan menjadi inti proses negosiasi yang melekat dengan berbagai perbedaan serta kepentingan nasional, organisasi serta individu.²⁵

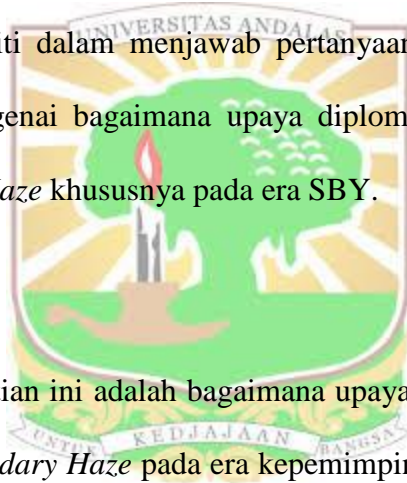
²⁴ Pramudianto Andreas, hal 51

²⁵ Adirini Pujayanti, “INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) DAN LINGKUNGAN HIDUP”, hal 119-120
Adirini Pujayanti**

I.8 Metodologi

I.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan data dari sumber ilmiah, yang ditujukan untuk memahami tentang isu seperti apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara deskriptif analitis yang berbentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan perhitungan serta pengolahan data berbentuk angka, akan tetapi lebih kepada pemantauan data-data yang sudah ada.²⁶ Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif dan cara deskriptif analitis, maka diharapkan dapat membantu memudahkan peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian yang akan diangkat secara lengkap dan jelas mengenai bagaimana upaya diplomasi lingkungan Indonesia dalam mengatasi isu *Transboundary Haze* khususnya pada era SBY.



I.8.2 Batasan Masalah

Fokus masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya diplomasi lingkungan Indonesia dalam mengatasi isu *Transboundary Haze* pada era kepemimpinan SBY. Oleh sebab itu, batasan masalah yang akan dipilih adalah diplomasi lingkungan pada zaman pemerintahan SBY terhadap negara Singapura, karena negara Singapura merupakan salah satu negara yang terkena dampak besar dari pencemaran kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia. Selain itu, secara geografis negara Singapura berada dekat dengan sebagian besar titik api kebakaran hutan yang terletak di negara Indonesia yaitu provinsi Kalimantan dan Sumatera.

²⁶ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan ke-22 (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset,2006) hal 5

I.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah suatu unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan diprediksi atau disebut juga dengan *variable independen*.²⁷ Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Indonesia, dimana diplomasi lingkungan merupakan alat bagi negara Indonesia dalam mengatasi isu lingkungannya. Selanjutnya adalah unit eksplanasinya adalah upaya diplomasi lingkungan Indonesia terhadap Singapura, dan yang menjadi level analisisnya adalah negara.

I.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk membantu peneliti dalam menulis penelitian ini, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah, teknik *library research*. Teknik *library research* atau disebut juga dengan studi pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berbentuk buku, jurnal, berita, dokumen-dokumen, serta makalah yang berhubungan dengan isu lingkungan dan diplomasi lingkungan Indonesia. Peneliti juga akan menggunakan dua kategori dari studi pustaka, yaitu data primer dan sekunder.²⁸ Data primer adalah data yang peneliti dapatkan langsung dari sumbernya, yang dapat berupa penjelasan mengenai *environmental diplomacy* Indonesia terkait isu *Transboundary Haze* melalui situs resmi seputar lingkungan seperti; (kemenkeu.go.id, kemlu.go.id, badungkab.go.id, dan menlhk.go.id). Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti secara tidak

²⁷ Dewi Triwahyuni, *Teori Dalam Hubungan Internasional*, hal. 10, <http://repository.unikom.ac.id/31445/1/%TEOORI%20DALAM%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.pdf> (accessed: March 1, 2020)

²⁸ Sijai, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian (Macam-macam dan Instrumen)*, <http://sijai.com/teknik-pengumpulan-data/> (accessed: March 19, 2020)

langsung dari sumbernya yang berbentuk jurnal, artikel, surat kabar, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu lingkungan *Transboundary Haze* Indonesia.

I.8.5 Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data bisa dibagi ke dalam beberapa tahapan. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data dapat dilakukan melalui empat tahapan:²⁹

1. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yang merupakan tahap pertama dalam melakukan penelitian. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data-data, seperti; surat kabar, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, serta skripsi yang berhubungan dengan diplomasi lingkungan yang akan diteliti.
2. Tahap kedua adalah reduksi data, dimana pada tahap ini hal yang dilakukan adalah menyesuaikan data-data yang sesuai dengan judul penelitian setelah itu dikelompokkan per sub-bab sesuai yang telah peneliti kumpulkan.
3. Tahap ketiga adalah penyajian data (*display data*). Setelah data dikelompokkan, kemudian ditulis ke dalam bentuk tulisan deskriptif agar lebih mudah untuk dipahami dan agar dapat melakukan analisis dan *research* selanjutnya.
4. Tahap yang terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi, dimana data data yang telah melalui tahap pengumpulan, penyesuaian, dan disajikan ke dalam bentuk tulisan deskriptif tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

²⁹ Ali Sya'ban, M.Pd, "Teknik analisa Data," 2005, hal 69-70

I.9 Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II POLUSI KABUT ASAP LINTAS BATAS (*TRANSBOUNDARY HAZE*) DI INDONESIA

Bab ini membahas mengenai bagaimana kronologi isu lingkungan terjadi di Indonesia dan negara lain di kawasan Asia Tenggara.

BAB III DAMPAK *TRANSBOUNDARY HAZE* TERHADAP INDONESIA DAN SINGAPURA

Bab ini akan membahas mengenai dampak isu lingkungan kabut asap lintas batas negara yang disebabkan oleh kebakaran hutan terhadap negara Indonesia dan Singapura.

BAB IV STRATEGI DIPLOMASI LINGKUNGAN SBY TERKAIT ISU LINGKUNGAN *TRANSBOUNDARY HAZE*

Bab ini akan menganalisa bagaimana strategi dari diplomasi lingkungan Indonesia terkait isu pencemaran asap lintas batas atau (*transboundary haze*) yang tidak hanya merugikan negara Indonesia tetapi juga negara seperti Singapura. Analisis menggunakan diplomasi lingkungan untuk menjawab pertanyaan penelitian.



BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

